

BAB II

Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara

Pada bab ini, pembahasan difokuskan dengan menelaah dinamika perkembangan kebijakan keamanan maritim Indonesia khususnya pada kawasan Laut Natuna Utara. Sebagai wilayah perairan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki posisi geopolitik yang strategis, Laut Natuna Utara telah menjadi kawasan yang mendapatkan perhatian khusus dalam formulasi kebijakan keamanan maritim nasional. Kawasan ini tidak hanya menyimpan potensi hidrokarbon yang signifikan bagi masa depan energi Indonesia, tetapi juga menjadi titik temu berbagai kepentingan regional dan internasional yang kompleks.

Melalui eksplorasi komprehensif, bab ini berupaya memberikan landasan analitis bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai dilema strategis yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskursus akademis mengenai optimalisasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di kawasan yang memiliki nilai strategis nasional.

2.1. Perkembangan Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan kebijakan keamanan maritimnya. Perkembangan ini tidak terlepas dari posisi geografis Indonesia yang strategis dan kaya akan sumber daya laut, serta tantangan keamanan yang dihadapi di wilayah perairannya. Sebagai negara dengan dua per tiga wilayahnya berupa laut, keamanan maritim menjadi komponen vital dalam menjaga integritas nasional, menjamin

keberlanjutan ekonomi, serta menjawab ancaman keamanan non-tradisional yang semakin kompleks di abad ke-21. Kebijakan ini juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara yang semakin dinamis dan sensitif terhadap perubahan geopolitik global.

Sejak era kemerdekaan hingga kini, pendekatan Indonesia terhadap keamanan maritim telah mengalami berbagai fase transisi yang mencerminkan dinamika politik domestik dan tekanan internasional. Penguatan aktor negara, pembentukan lembaga khusus, serta adopsi instrumen hukum internasional menjadi penanda evolusi kebijakan tersebut. Bab ini akan menelaah perkembangan tersebut secara kronologis dan strategis.

2.1.1. Fondasi Keamanan Maritim Indonesia

Keamanan maritim Indonesia memiliki akar yang sangat dalam, yang tidak hanya dimulai setelah kemerdekaan, tetapi juga telah tercermin dalam tradisi maritim yang telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, seperti Majapahit. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan laut. Laut bukan hanya menjadi sarana untuk berdagang, tetapi juga merupakan bagian integral dari kekuatan dan kedaulatan negara. Penguasaan laut oleh kerajaan-kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia telah lama mengandalkan laut sebagai sumber daya utama, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki pengaruh besar terhadap jalur perdagangan maritim di Asia. Majapahit dikenal sebagai kekuatan maritim yang

dominan, yang mampu mengendalikan wilayah laut yang sangat luas di kawasan ini (Manguputty, 2012; Zonneveld, 2019). Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dengan wilayah lainnya, seperti India dan Cina. Kekuatan maritim Majapahit tercermin dalam penguasaan armada laut yang digunakan untuk melindungi jalur perdagangan, serta memastikan kontrol terhadap wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam di sekitarnya

Setelah Indonesia merdeka, prinsip maritim yang diwariskan dari sejarah kerajaan-kerajaan Indonesia terus dipelihara, salah satunya melalui semboyan TNI Angkatan Laut (TNI AL), yaitu "Jalesveva Jayamahe", yang berarti "Justru Di Laut Kita Menang". Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya laut dalam menjaga kedaulatan dan kekuatan negara dan semboyan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadikan kekuatan maritim sebagai pilar utama pertahanan negara (Agung, 2020; Sukma, 2018). Sebagai negara dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga dan mengamankan perairannya yang luas. Prinsip ini juga menjadi landasan dalam pengembangan doktrin pertahanan laut Indonesia, yang menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap perairan Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah negara.

Fondasi kebijakan maritim Indonesia semakin diperkuat dengan munculnya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini mengubah pandangan dunia mengenai status wilayah laut Indonesia, dengan menyatakan bahwa semua perairan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia adalah bagian dari satu

kesatuan wilayah Indonesia. Dengan demikian, Deklarasi Djuanda tidak hanya mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi juga menegaskan hak kedaulatan Indonesia atas laut di antara pulau-pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke (Beckman, 2017). Deklarasi ini menjadi dasar hukum penting yang melandasi kebijakan keamanan maritim Indonesia, yang memfokuskan pada pengelolaan dan pengawasan wilayah laut untuk kepentingan nasional

Di tingkat internasional, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 menjadi pijakan hukum yang sangat penting bagi Indonesia. Setelah ratifikasi UNCLOS pada tahun 1986, Indonesia mengadopsi sistem hukum internasional ini sebagai dasar untuk memperkuat klaim kedaulatan atas wilayah lautnya, termasuk di sekitar Laut Natuna Utara. UNCLOS 1982 memberikan Indonesia hak untuk mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pantai terluar, yang memungkinkan Indonesia untuk mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. Selain itu, UNCLOS juga menjadi landasan hukum yang mengatur hak-hak Indonesia atas pengelolaan wilayah lautnya, serta kewajiban untuk menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan laut. Ratifikasi UNCLOS oleh Indonesia pada tahun 1986 menggarisbawahi pentingnya hukum internasional dalam pengaturan batas-batas maritim Indonesia dan memperkuat kedaulatan negara di laut (Beckman, 2017).

Dengan landasan hukum yang kokoh dan prinsip-prinsip maritim yang kuat, Indonesia terus mengembangkan kebijakan keamanan maritimnya untuk menghadapi berbagai tantangan yang timbul dari ancaman eksternal maupun internal. Keamanan maritim Indonesia, yang didasarkan pada sejarah panjang dan

prinsip-prinsip yang telah teruji, akan terus menjadi faktor kunci dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas kawasan.

2.1.2. Transformasi Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia Pasca-1998

Pasca-reformasi, Indonesia mulai menyadari pentingnya pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya laut dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas di perairan Indonesia. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada tahun 2014, yang bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga yang terlibat dalam pengamanan laut Indonesia. Sebelumnya, pengawasan maritim Indonesia cenderung terfragmentasi, dengan berbagai lembaga yang memiliki tanggung jawab yang saling tumpang tindih. Dengan pembentukan Bakamla, Indonesia berharap dapat mengatasi masalah tersebut dan memperkuat koordinasi antar lembaga seperti TNI Angkatan Laut, Polair, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, kebijakan Indonesia dalam menangani *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* semakin diperkuat dengan langkah-langkah yang lebih tegas, seperti penenggelaman kapal asing yang tertangkap melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Kebijakan ini, yang dikenal dengan sebutan “*Sink the Vessels*” mulai dilaksanakan sejak 2014 dan menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi pencurian ikan oleh negara asing, yang merugikan Indonesia baik secara ekonomi maupun ekologi (Anggraini, Kusumawardhana, & Ramadhan, 2018).

Ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia sangat beragam, dan semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan eksplorasi

di wilayah maritim. Salah satu ancaman utama adalah *IUU fishing*, yang tidak hanya merugikan sektor perikanan Indonesia, tetapi juga berdampak pada ekosistem laut yang semakin terancam. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), *IUU fishing* telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia, dengan perkiraan kerugian mencapai miliaran dolar setiap tahunnya (Susanto, 2021). Selain itu, eksploitasi sumber daya alam maritim, seperti penambangan ilegal dan pencurian bangkai kapal, juga menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan Indonesia.

IUU fishing merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak tercatat atau tidak sah, baik oleh kapal asing maupun kapal domestik yang melanggar peraturan nasional dan internasional. Praktik ini sering kali dilakukan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang kaya akan sumber daya ikan. Kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Indonesia sering kali melakukannya tanpa izin atau tanpa melaporkan hasil tangkapan mereka, yang merugikan ekonomi lokal dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Selain itu, eksploitasi maritim juga mencakup pencurian bangkai kapal yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Laut Natuna Utara, di mana bangkai kapal yang tenggelam atau terdampar sering kali dieksploitasi untuk diambil logam dan barang berharga lainnya. Fenomena ini, meskipun tampak sepele, menunjukkan adanya praktik ilegal yang merusak integritas maritim Indonesia, serta memperburuk tantangan dalam mengelola dan mengawasi wilayah perairan yang luas.

Tantangan-tantangan maritim ini semakin terasa pasca-1998, terutama setelah Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan. Salah satu peristiwa penting yang memicu kesadaran Indonesia tentang pentingnya keamanan maritim adalah peningkatan aktivitas pencurian ikan yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara pada awal 2000-an. Pada saat itu, Indonesia mulai menghadapi peningkatan jumlah kapal asing yang memasuki ZEE Indonesia dan melakukan aktivitas ilegal, seperti pencurian ikan yang merusak ekosistem laut dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat nelayan di daerah pesisir.

Pada 2016, insiden terkait pencurian ikan oleh kapal Tiongkok di Laut Natuna Utara semakin memperjelas pentingnya kebijakan keamanan maritim yang tegas. Indonesia merespons dengan peningkatan patroli oleh TNI AL dan Bakamla, serta melakukan diplomasi melalui ASEAN dan forum internasional untuk memperjuangkan hak-hak maritim Indonesia (Cochrane, 2020). Sejak saat itu, kebijakan yang lebih berani dan tegas terus diterapkan dalam menghadapi ancaman maritim, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Laut Natuna.

Dalam mengatasi ancaman maritim, Indonesia melibatkan berbagai aktor, baik di tingkat domestik maupun internasional. Di tingkat domestik, aktor utama yang terlibat dalam kebijakan keamanan maritim Indonesia adalah TNI Angkatan Laut, Polair, dan Bakamla. TNI AL, dengan kekuatan armada lautnya, memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia, sementara Bakamla bertugas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pengawasan maritim. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga

berperan dalam menangani *IUU fishing* dan mengatur kebijakan pengelolaan sumber daya alam laut Indonesia (Suryadinata, 2021).

Di tingkat internasional, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi regional seperti ASEAN, serta berbagai negara mitra seperti Australia, India, dan Jepang, untuk menangani ancaman maritim yang bersifat transnasional. Kerja sama ini meliputi patroli bersama, pertukaran data intelijen maritim, serta penguatan diplomasi untuk memperjuangkan hak-hak maritim Indonesia di forum internasional.

Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi ancaman maritim yang kompleks ini. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kapasitas pengawasan maritim, yang melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti satelit pemantau, drone laut, dan *Automatic Identification System (AIS)* untuk memantau aktivitas kapal-kapal di perairan Indonesia. Selain itu, penenggelaman kapal asing yang tertangkap melakukan *IUU fishing* menjadi kebijakan yang mendapat perhatian besar sebagai upaya untuk menegakkan hukum di perairan Indonesia dan memberikan efek jera bagi para pelaku (Bakamla RI, 2022). Selain itu, Indonesia juga semakin memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis dalam rangka mengurangi ancaman maritim dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Diplomasi yang lebih aktif melalui ASEAN dan forum internasional lainnya juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan klaim Indonesia atas wilayah maritim, termasuk Laut Natuna Utara.

2.1.3. *Global Maritime Fulcrum*: Visi Maritim Era Jokowi

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengembangkan visi yang dikenal dengan sebutan *Global Maritime Fulcrum* (GMF) atau Poros Maritim Dunia, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia. Visi ini mengedepankan pentingnya laut dalam kebijakan luar negeri dan dalam negeri Indonesia, serta menempatkan peran maritim sebagai pusat kekuatan nasional yang dapat mendukung stabilitas kawasan dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Global Maritime Fulcrum adalah konsep kebijakan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo yang mengutamakan peran maritim Indonesia dalam menjaga keamanan regional dan internasional serta mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di wilayah laut. Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat atau *fulcrum* yang menghubungkan jalur-jalur perdagangan internasional, serta memanfaatkan potensi besar laut Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan jalur pelayaran strategis. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya laut, tetapi juga pada peningkatan kapabilitas pertahanan maritim, penguatan diplomasi maritim, dan pengembangan infrastruktur terkait kelautan (Laksmiana, 2020).

Global Maritime Fulcrum bertujuan untuk menanggapi tantangan geopolitik dan maritim yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Indonesia berperan sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis di jalur pelayaran dunia, menjadikannya titik kunci dalam sistem perdagangan global dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, Indonesia perlu

memperkuat posisi maritimnya untuk menghadapi tantangan ini dan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam tatanan internasional yang semakin kompleks (Suryadinata, 2021).

Visi ini penting karena beberapa alasan strategis yang mendalam. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan dua pertiga wilayahnya berupa laut, memiliki peran krusial dalam keamanan dan stabilitas kawasan. Laut Indonesia bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga merupakan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, dan India. Dalam konteks ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga kedaulatan wilayah lautnya dari berbagai ancaman, seperti *IUU fishing*, militerisasi Laut Cina Selatan, serta ancaman non-tradisional seperti penyelundupan dan terorisme maritim (Cochrane, 2020).

Kedua, visi ini berupaya untuk memanfaatkan potensi ekonomi maritim Indonesia. Dengan meningkatkan sektor perikanan, energi terbarukan laut, dan pariwisata bahari, Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya kelautannya. Sebagai negara dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan. Dalam hal ini, Global Maritime Fulcrum bertujuan untuk menghubungkan sektor-sektor tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Suryadinata, 2021).

Ketiga, Indonesia perlu memperkuat kapabilitas pertahanan maritimnya. Dengan semakin intensifnya klaim teritorial negara lain di kawasan seperti China di Laut Cina Selatan, Indonesia perlu memiliki kekuatan maritim yang cukup untuk

mempertahankan kedaulatan wilayah lautnya. Sebagai bagian dari GMF, Indonesia fokus pada peningkatan kapasitas TNI Angkatan Laut dan lembaga-lembaga terkait seperti Bakamla untuk meningkatkan pengawasan dan pertahanan di perairan nasional (Sebastian, 2020).

Implementasi visi *Global Maritime Fulcrum* dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan program strategis, yang mencakup penguatan infrastruktur maritim, modernisasi armada TNI AL, peningkatan kerja sama internasional, serta pembangunan kawasan maritim yang mendukung sektor ekonomi.

1. Penguatan Infrastruktur Maritim : Salah satu aspek utama dari GMF adalah pengembangan infrastruktur pelabuhan, fasilitas logistik, dan transportasi laut yang lebih efisien. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan, telah melakukan pembangunan dan renovasi pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia, seperti Pelabuhan Makassar, Tanjung Priok, dan Batam, untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Proyek Tol Laut yang digagas oleh pemerintah bertujuan untuk menghubungkan wilayah Indonesia yang terisolasi, memperlancar distribusi barang, dan menurunkan biaya logistik (Suryadinata, 2021).
2. Modernisasi Armada TNI Angkatan Laut : Seiring dengan visi GMF, Indonesia meningkatkan anggaran untuk pertahanan maritim. Peningkatan anggaran ini digunakan untuk modernisasi armada kapal perang, yang mencakup pembelian kapal selam, fregat, dan kapal perang permukaan canggih lainnya. Modernisasi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia tetapi juga untuk memperkuat

kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman eksternal di kawasan (Sebastian, 2020).

3. Diplomasi Maritim dan Kerja Sama Internasional : Indonesia aktif menjalin kerja sama diplomatik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim. Indonesia memanfaatkan forum-forum internasional seperti ASEAN, ARF (*ASEAN Regional Forum*), dan EAS (*East Asia Summit*) untuk memperkuat peran maritimnya di dunia. Selain itu, Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara besar seperti India, Australia, dan Amerika Serikat untuk menjaga kestabilan di Laut Cina Selatan dan kawasan sekitarnya (Cochrane, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mendukung visi GMF. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengalokasikan lebih dari IDR 40 triliun untuk sektor kelautan dan perikanan, termasuk untuk modernisasi armada TNI AL, pembangunan pelabuhan, dan peningkatan kapasitas Bakamla (Sebastian, 2020). Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga internasional dan negara mitra untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur maritim, dengan investasi yang diperkirakan mencapai miliaran dolar dalam beberapa tahun mendatang.

Peningkatan anggaran pertahanan maritim, yang juga mencakup pembelian kapal-kapal perang dan pengembangan teknologi pertahanan laut, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan visinya sebagai Global Maritime Fulcrum. Pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk pengawasan laut dan

perlindungan terhadap sumber daya alam laut semakin menjadi prioritas, mengingat ancaman yang semakin meningkat di kawasan ini (Suryadinata, 2021).

2.1.4. Transformasi Kelembagaan dan Koordinasi

Keamanan maritim Indonesia sangat bergantung pada efektivitas kelembagaan dan koordinasi antar lembaga negara yang terlibat dalam pengelolaan wilayah laut. Transformasi kelembagaan ini penting karena tantangan yang dihadapi oleh Indonesia di bidang maritim semakin kompleks, dengan ancaman yang datang dari *IUU fishing*, penyelundupan, pembajakan, hingga konflik teritorial dengan negara-negara besar seperti China dan Vietnam. Oleh karena itu, memperkuat koordinasi antar lembaga yang bertugas di sektor kelautan dan keamanan maritim menjadi salah satu aspek krusial untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengamanan perairan Indonesia.

Transformasi kelembagaan dan koordinasi dalam konteks keamanan maritim Indonesia merujuk pada perubahan struktural dan penguatan peran lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah laut Indonesia. Ini termasuk peran TNI Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polair, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta berbagai lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab terkait dengan maritim. Transformasi kelembagaan ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia. Kelembagaan yang efektif dan koordinasi yang baik sangat penting, mengingat perairan Indonesia yang luas dan tantangan yang beragam yang dihadapinya, seperti ancaman dari negara asing, eksploitasi

sumber daya alam ilegal, dan ancaman non-tradisional seperti penyelundupan narkoba dan terorisme maritim. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan maritim Indonesia (Cochrane, 2020).

Transformasi kelembagaan dan koordinasi sangat penting karena Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perairan yang sangat luas, yang mencakup sekitar dua pertiga dari total wilayahnya. Dengan tantangan yang semakin besar, seperti meningkatnya kegiatan *IUU fishing* yang merugikan ekonomi negara dan ancaman militer dari negara-negara yang mengklaim sebagian wilayah laut Indonesia, negara ini memerlukan sistem yang terkoordinasi untuk menangani berbagai ancaman tersebut. Lebih dari itu, Indonesia menghadapi masalah fragmentasi kelembagaan di sektor maritim, di mana masing-masing lembaga memiliki mandat yang berbeda namun seringkali tumpang tindih dalam pengawasan dan penegakan hukum. Sebagai contoh, TNI AL memiliki kewenangan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan, sementara KKP lebih fokus pada pengelolaan sumber daya laut dan Bakamla bertugas mengkoordinasikan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Tanpa koordinasi yang efektif, potensi pengawasan yang maksimal terhadap ancaman maritim bisa terabaikan, sehingga menurunkan efektivitas kebijakan negara dalam mengelola dan menjaga wilayah laut (Sebastian, 2020).

2.1.5. Menuju Era Kepemimpinan Prabowo

Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menandai fase baru dalam orientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia, khususnya di kawasan strategis

Laut Natuna Utara. Reorientasi ini ditandai dengan peningkatan fokus terhadap aspek pertahanan maritim, memperkuat kehadiran militer di wilayah perbatasan, dan adopsi pendekatan strategis yang lebih tegas dalam menghadapi berbagai ancaman tradisional maupun non-tradisional. Upaya tersebut merupakan kelanjutan dan pengembangan dari visi *Global Maritime Fulcrum (GMF)* yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun dengan tekanan yang lebih kuat terhadap penggunaan instrumen *hard power* untuk mempertahankan kedaulatan nasional di perairan strategis.

Urgensi dari reorientasi ini dipicu oleh beberapa faktor yang semakin mengemuka. Pertama, meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara akibat pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh kapal-kapal asing, terutama dari Tiongkok, memaksa Indonesia untuk memperkuat postur pertahanannya di kawasan tersebut (Manyanua, Niode, & Tulung, 2023). Kedua, dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia semakin memperketat persaingan maritim dan memperbesar risiko konflik di Laut Cina Selatan. Ketiga, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya energi di Laut Natuna Utara menjadi semakin penting bagi ketahanan energi nasional, sehingga memerlukan perlindungan yang lebih efektif. Terakhir, ancaman non-tradisional seperti *illegal fishing*, penyelundupan manusia, dan degradasi lingkungan laut menjadi isu kritis yang menuntut penanganan komprehensif (Iswardhana, 2023).

Dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mengadopsi berbagai langkah strategis. Salah

satu langkah utama adalah modernisasi kekuatan pertahanan maritim dengan mempercepat pengadaan kapal perang, kapal selam, serta sistem pemantauan dan deteksi maritim berbasis teknologi canggih, termasuk penggunaan satelit dan drone laut (Mustari, Supartono, & Barnas, 2018). Selain itu, penempatan pasukan tambahan dan pembangunan pangkalan militer di kawasan Natuna menjadi prioritas untuk memastikan kehadiran fisik negara di wilayah yang rawan klaim oleh pihak asing. Indonesia juga memperkuat kerja sama pertahanan regional melalui ASEAN dan forum Indo-Pasifik lainnya, sebagai bagian dari upaya diplomasi maritim untuk menjaga stabilitas kawasan.

Dalam konteks tantangan terbaru, beberapa isu penting perlu dicermati. Salah satunya adalah militerisasi yang semakin intensif di Laut Cina Selatan, di mana Tiongkok memperkuat klaim teritorialnya dengan mengerahkan kapal-kapal coast guard bersenjata dan milisi maritim, yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan dan memperbesar risiko konfrontasi (Manyanua, Niode, & Tulung, 2023). Selain itu, fenomena *El Niño Southern Oscillation* (ENSO) berpengaruh terhadap kondisi laut di Natuna, meningkatkan potensi terjadinya gelombang tinggi yang dapat mengganggu operasi keamanan dan pelayaran (Azhari, Pranowo, Hendra, & Umam, 2023). Tantangan lainnya adalah tekanan terhadap pengelolaan sumber daya maritim akibat aktivitas illegal fishing dan eksploitasi laut yang tidak berkelanjutan, yang mengancam ekosistem serta kedaulatan ekonomi nasional (Iswardhana, 2023).

Dengan demikian, kepemimpinan Prabowo mengusung paradigma baru dalam pengelolaan keamanan maritim Indonesia, yakni mengombinasikan

kekuatan militer yang solid dengan diplomasi maritim aktif, serta penguatan kapasitas nasional dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya laut. Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan, menjaga stabilitas kawasan, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi laut bagi kepentingan nasional.

2.2. Konflik Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara telah menjadi titik fokus dalam dinamika keamanan maritim Indonesia karena posisinya yang bersinggungan langsung dengan klaim sepihak Tiongkok melalui konsep *Nine-Dash Line*. Klaim tersebut tidak hanya mencederai kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tetapi juga memicu serangkaian ketegangan diplomatik dan militer di kawasan. Konflik di Laut Natuna Utara merupakan manifestasi dari tumpang tindih antara hak berdaulat Indonesia yang diakui secara internasional dan ambisi ekspansionis Tiongkok yang tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS 1982.



Gambar 2.1 Peta Laut Natuna Utara

(Sumber: Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, CC0, via Wikimedia Commons)

Laut Natuna Utara memiliki kepentingan yang sangat besar bagi Indonesia dari segi ekonomi, energi, dan keamanan nasional. Secara geografis, Laut Natuna Utara merupakan jalur pelayaran internasional yang penting, menghubungkan kawasan Asia Timur dengan wilayah Pasifik dan Hindia. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk cadangan gas alam di Blok East Natuna, menjadikan kawasan ini vital bagi ketahanan energi Indonesia.

Pertama, kepentingan ekonomi Indonesia di Laut Natuna Utara sangat besar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada potensi sumber daya alam laut untuk keberlanjutan ekonominya. Laut Natuna Utara memiliki cadangan gas alam yang signifikan, yang merupakan bagian dari Blok East Natuna yang diperkirakan memiliki potensi lebih dari 200 triliun kaki kubik gas alam (Beckman, 2017). Pengelolaan dan perlindungan kawasan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional, mengingat ketergantungan Indonesia pada sektor energi.

Kedua, keamanan maritim Indonesia juga sangat bergantung pada stabilitas di Laut Natuna Utara. Laut ini merupakan wilayah strategis yang harus dijaga kedaulatannya dari berbagai ancaman eksternal, terutama klaim sepihak dari China. Selain itu, ancaman lain seperti IUU fishing yang dilakukan oleh kapal asing, khususnya dari China, telah merugikan Indonesia secara ekonomi dan ekologis. Tindakan tegas terhadap aktivitas ilegal ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan kelestarian ekosistem laut (Anggraini, Kusumawardhana, & Ramadhan, 2018).

Indonesia telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menghadapi konflik di Laut Natuna Utara, baik melalui pendekatan diplomatik maupun militer. Pada tingkat diplomatik, Indonesia telah mengajukan protes secara tegas terhadap klaim China yang melanggar kedaulatan Indonesia atas ZEE-nya di Laut Natuna Utara. Indonesia juga berusaha menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN dan komunitas internasional untuk menanggapi klaim sepihak ini. Salah satu langkah diplomatik penting adalah pernyataan Indonesia dalam forum-forum internasional seperti ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menegaskan bahwa klaim China bertentangan dengan UNCLOS 1982, yang mengakui hak-hak ZEE Indonesia (Beckman, 2017). Di tingkat militer, Indonesia telah meningkatkan kehadiran pasukan di Laut Natuna Utara. TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengintensifkan patroli dan pengawasan untuk mengatasi ancaman dari kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal, termasuk pencurian ikan dan eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, Indonesia juga memperkuat infrastruktur maritim di kawasan ini dengan membangun pangkalan militer dan memperbarui armada kapal perang serta kapal selam untuk memperkuat kekuatan pertahanan lautnya (Suryadinata, 2021).

Pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan tegas terhadap illegal fishing dengan menjalankan program *"Sink the Vessels"* yang melibatkan penenggelaman kapal-kapal asing yang tertangkap melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada negara-negara yang mencoba mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara ilegal (Susanto, 2021). Selain itu, Indonesia terus memperkuat kerjasama internasional

dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis seperti Australia, India, dan Amerika Serikat. Melalui kerjasama ini, Indonesia berusaha untuk memperkuat posisi maritimnya di kawasan Indo-Pasifik dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara (Sebastian, 2020).

Konflik Laut Natuna Utara adalah isu yang sangat penting bagi Indonesia baik dari segi ekonomi, energi, maupun keamanan nasional. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan posisinya yang strategis, kawasan ini menjadi vital bagi kelangsungan hidup Indonesia. Meskipun menghadapi ancaman dari klaim teritorial China dan berbagai aktivitas ilegal, Indonesia terus memperkuat kebijakan maritimnya melalui kombinasi diplomasi, penguatan pertahanan, dan kerjasama internasional. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kedaulatan Indonesia atas Laut Natuna Utara tetapi juga untuk melindungi kepentingan ekonomi dan stabilitas kawasan secara keseluruhan.

2.2.1. Dasar Klaim dan Kontestasi Wilayah

Laut Natuna Utara adalah salah satu wilayah perairan strategis yang terletak di antara Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan China. Wilayah ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam seperti gas alam dan ikan, tetapi juga memiliki peranan penting sebagai jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Keberadaannya yang strategis menjadikannya pusat perhatian bagi beberapa negara yang saling mengklaim wilayahnya. Indonesia, berdasarkan hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, menegaskan bahwa Laut Natuna Utara adalah bagian

dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun, klaim ini tidak diakui sepenuhnya oleh negara-negara tetangga, khususnya China dan Vietnam, yang juga memiliki klaim atas perairan ini.

Klaim China terhadap Laut Natuna Utara sangat dipengaruhi oleh konsep "*Nine-Dash Line*" yang mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk perairan yang berdekatan dengan Natuna. Klaim ini tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS, yang mana Indonesia menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, insiden terkait pelanggaran wilayah, terutama oleh kapal-kapal China yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal, semakin memperumit hubungan antar negara di wilayah tersebut (Fauzan, Abdullah, & Ahmad, 2019). Meskipun Indonesia tidak mengklaim Laut China Selatan, namun kedekatan dan pengaruh klaim China terhadap wilayah Natuna memaksa Indonesia untuk meningkatkan upaya perlindungannya terhadap kedaulatan maritimnya.

Sementara itu, Vietnam juga mengklaim sebagian dari Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah maritimnya. Klaim Vietnam ini berawal dari perjanjian batas wilayah yang ditandatangani dengan Indonesia pada tahun 2003, yang mengatur perbatasan ZEE antara kedua negara. Namun, perbedaan interpretasi mengenai batas ZEE ini menyebabkan ketegangan dalam implementasi pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut, terutama dalam hal pengelolaan perikanan. Ketegangan ini semakin meningkat seiring dengan adanya insiden penangkapan kapal ikan Vietnam yang masuk ke wilayah perairan Indonesia, yang

kemudian disertai dengan tindakan penenggelaman kapal oleh pihak berwenang Indonesia (Yanto, 2023).

Selain Vietnam dan China, Negara yang sering disebut sebagai “Negeri Jiran” yaitu Malaysia juga terlibat dalam kontestasi wilayah Laut Natuna Utara, meskipun klaim Malaysia tidak sebesar dua negara sebelumnya. Malaysia memiliki kepentingan yang signifikan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Laut Natuna Utara, terutama terkait dengan cadangan gas alam yang besar di kawasan tersebut. Namun, klaim Malaysia ini tumpang tindih dengan ZEE Indonesia, yang semakin memperumit situasi diplomatik di kawasan tersebut (Kurniaty, Ikaningtyas, & Ruslijanto, 2018).

Klaim teritorial yang tumpang tindih ini tidak hanya menciptakan ketegangan antar negara, tetapi juga mempengaruhi kebijakan maritim Indonesia. Indonesia berupaya menyelesaikan sengketa ini dengan merujuk pada hukum internasional, terutama UNCLOS, untuk menegaskan bahwa Laut Natuna Utara adalah bagian dari ZEE yang sah milik Indonesia. Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomatik untuk mengatasi klaim sepihak dari China, Vietnam, dan Malaysia, tantangan besar tetap ada dalam hal penegakan kedaulatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di perairan tersebut (Qurbani, Sari, Yanto, & Hikmah, 2024). Dengan demikian, kontestasi wilayah Laut Natuna Utara mencakup klaim yang bersinggungan antara Indonesia, China, Vietnam, dan Malaysia, yang masing-masing memiliki kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik. Indonesia, dalam hal ini, menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui diplomasi, namun juga mengakui kebutuhan untuk

meningkatkan kehadiran militer dan pengawasan maritim guna melindungi kedaulatan wilayahnya.

2.2.2. Eskalasi Ketegangan dan Respons Indonesia di Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, telah menjadi pusat ketegangan yang meningkat, terutama sejak China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan melalui konsep "*Nine-Dash Line*". Meskipun Indonesia tidak terlibat dalam sengketa tersebut, klaim China yang meliputi sebagian wilayah Laut Natuna Utara memicu ketegangan, karena Indonesia menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari ZEE-nya berdasarkan UNCLOS 1982. Ketegangan ini semakin memburuk dengan maraknya aktivitas ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur (*IUU fishing*) oleh kapal-kapal asing, terutama dari China dan Vietnam, yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin.

Pada tahun 2016, ketegangan meningkat setelah Indonesia menangkap kapal-kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, terutama yang berbendera Vietnam dan China. China, yang mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari ZEE-nya berdasarkan peta *Nine-Dash Line*, menanggapi ketegangan ini dengan meningkatkan kehadiran kapal penjaga pantainya di perairan Natuna. Hal ini memicu serangkaian insiden, termasuk bentrokan antara kapal-kapal Indonesia dan kapal penjaga pantai China yang melakukan patroli di kawasan yang diklaim Indonesia sebagai ZEE-nya (Dharma, 2017).

Dalam menanggapi eskalasi ketegangan tersebut, Indonesia mengimplementasikan serangkaian langkah yang berfokus pada penguatan

kebijakan pertahanan maritim dan diplomasi internasional. Indonesia memperkuat kehadiran militernya di Laut Natuna Utara dengan menempatkan kapal perang dan pesawat patroli untuk memastikan keamanan wilayah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh klaim sepihak China dan tindakan ilegal seperti penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing (Putra, 2022). Indonesia juga menanggapi ketegangan ini dengan kebijakan diplomatik yang melibatkan komunikasi dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa teritorial di Laut China Selatan. Melalui ASEAN, Indonesia berupaya mengurangi ketegangan dan mengedepankan penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Indonesia juga menggandeng mitra internasional, seperti Amerika Serikat, untuk memperkuat posisi diplomatik dan militernya dalam menjaga kedaulatan wilayahnya di Laut Natuna Utara (Luerdi & Wahyudi, 2021).

Selain itu, Indonesia meningkatkan penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melanggar ZEE Indonesia. Beberapa kapal yang tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal dihancurkan sebagai bentuk tegas Indonesia dalam melindungi sumber daya alam dan wilayah kedaulatannya. Pemerintah Indonesia juga memperkuat kebijakan pertahanan di wilayah Natuna, termasuk pembangunan infrastruktur pertahanan yang lebih modern untuk menghadapi potensi ancaman dari negara-negara yang mengklaim wilayah tersebut (Putranto, Zid, & Miarsyah, 2019).

Tabel 2.1 Tabel Insiden Ketegangan di Laut Natuna Utara

Tanggal	Kejadian atau Permasalahan	Sumber
19 Maret 2016	Kapal TNI AL menembakkan tembakan peringatan ke kapal China yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna.	CNN Indonesia (2016)
21 Maret 2016	Kapal penjaga pantai China merusak kapal Indonesia yang sedang menangkap kapal trawl China di perairan Natuna.	Liputan6.com (2016)
5 April 2016	Indonesia menghancurkan 23 kapal asing, termasuk dari Vietnam, yang tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal.	Maritim News (2016)
23 Juni 2016	Presiden Jokowi mengunjungi Natuna dengan kapal perang untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut.	BBC Indonesia (2016)
19 Desember 2019	Kapal-kapal China, termasuk kapal penjaga pantai, memasuki perairan Natuna yang diklaim Indonesia sebagai ZEE, memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara.	Kompas.com (2019)
29 Januari 2020	Kapal-kapal penangkap ikan China, dikawal oleh kapal penjaga pantai China, kembali memasuki perairan Natuna.	BBC Indonesia (2020)

22 Desember 2020	China mengklaim telah mengusir kapal perusak rudal AS "John S. McCain" yang memasuki perairan yang diklaim China dekat Kepulauan Spratly.	CNN Indonesia (2020)
28 Agustus 2023	China mengeluarkan peta baru dengan menambahkan garis kesembilan, yang memicu protes dari Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.	BNPP (2023)
17 Juni 2024	Kapal-kapal China dan Filipina saling menuduh sengaja menabrak penjaga pantai di Laut Cina Selatan	Kompas.id (2024)

2.2.3. Strategi Indonesia Mengelola Ketegangan Maritim di Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara memiliki peranan yang sangat vital bagi Indonesia, baik dari aspek ekonomi maupun geopolitik. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, seperti gas dan hasil laut yang menjadikannya sangat bernilai bagi perekonomian Indonesia. Namun, kawasan ini juga menjadi titik pusat ketegangan yang semakin meningkat, terutama terkait dengan klaim sepihak China yang menganggap sebagian besar Laut China Selatan, termasuk Natuna, sebagai bagian dari wilayahnya. Ketegangan ini semakin diperburuk dengan banyaknya aktivitas ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sah (*IUU fishing*) yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, khususnya dari China dan Vietnam, yang beroperasi di perairan Indonesia tanpa

izin. Untuk menghadapi ketegangan tersebut, Indonesia telah merumuskan berbagai strategi untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya, melindungi kekayaan alamnya, serta memastikan stabilitas regional.

Salah satu strategi utama Indonesia adalah melalui pendekatan diplomatik yang aktif. Indonesia berusaha untuk menyelesaikan sengketa maritim di Laut Natuna Utara dengan mengedepankan dialog dan kerjasama internasional, terutama melalui forum-forum multilateral seperti ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia memanfaatkan posisi dan pengaruhnya di ASEAN untuk membangun konsensus regional tentang pentingnya menghormati prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), yang mengatur tentang hak-hak negara atas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Upaya diplomatik ini bertujuan untuk meredakan ketegangan dan mencegah konfrontasi langsung, sambil menegaskan klaim Indonesia atas Laut Natuna Utara sebagai bagian dari ZEE Indonesia (Miftahuddin, 2024).

Di samping diplomasi, Indonesia juga memperkuat penegakan hukum di Laut Natuna Utara dengan meningkatkan kehadiran maritimnya. Hal ini dilakukan melalui peningkatan patroli maritim oleh Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), yang dilengkapi dengan teknologi canggih seperti pengawasan satelit dan pesawat tanpa awak (UAV) untuk mendeteksi dan menangani aktivitas ilegal. Kapal-kapal asing yang melanggar hukum sering kali ditindak tegas, bahkan dengan cara menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia (Marliani, 2024). Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk

melindungi sumber daya alam Indonesia, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga kedaulatan maritimnya dengan tegas.

Selain itu, Indonesia juga mengandalkan kekuatan militer dalam menjaga stabilitas di Laut Natuna Utara. Meskipun Indonesia lebih memilih untuk menghindari konfrontasi langsung dengan negara lain, terutama China, keberadaan pasukan militer di wilayah tersebut menjadi penting sebagai upaya deterensi. Penempatan kapal perang, pesawat patroli, dan pesawat pengintai oleh Indonesia di perairan Natuna Utara bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman terhadap kedaulatan wilayahnya. Strategi ini juga mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan terukur dalam menjaga kedaulatan Indonesia tanpa memicu eskalasi konflik yang lebih besar (Putra, 2024).

Lebih lanjut, Indonesia juga terus meningkatkan kerjasama internasional dengan negara-negara mitra strategis untuk memperkuat kapasitas keamanan maritimnya. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang telah menjadi mitra penting Indonesia dalam meningkatkan kesiapan maritim dan patroli di Laut Natuna Utara. Kerja sama ini mencakup latihan militer bersama, pertukaran intelijen, serta dukungan teknologi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan intersepsi terhadap kapal-kapal asing yang melanggar hukum (Putranto, Zid, & Miarsyah, 2019). Kerjasama internasional ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di Laut Natuna, tetapi juga membantu menciptakan stabilitas di kawasan yang rentan terhadap ketegangan geopolitik.

Secara keseluruhan, strategi Indonesia dalam mengelola ketegangan maritim di Laut Natuna Utara melibatkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup diplomasi, penegakan hukum, kekuatan militer, dan kerja sama internasional. Meskipun tantangan tetap ada, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan maritimnya dengan cara yang damai dan terukur, sambil tetap siap untuk melindungi wilayahnya dari potensi ancaman yang datang dari luar. Ini merupakan bagian penting dari upaya Indonesia untuk memastikan bahwa Laut Natuna Utara tetap menjadi wilayah yang aman, stabil, dan produktif bagi negara dan rakyat Indonesia.

2.2.4. Peran ASEAN dalam Menyelesaikan Konflik Laut Natuna Utara: Perspektif Multilateral

Konflik di Laut Natuna Utara, yang melibatkan klaim teritorial oleh negara-negara seperti China, Vietnam, dan Indonesia, telah menimbulkan ketegangan maritim yang signifikan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola dan menyelesaikan ketegangan ini melalui pendekatan multilateral. ASEAN, yang terdiri dari sepuluh negara anggota, memainkan peran kunci dalam menyelesaikan sengketa Laut Natuna Utara dengan mengutamakan diplomasi dan prinsip-prinsip perdamaian. Melalui mekanisme dan prinsip *ASEAN Way*, yang mengutamakan penyelesaian damai melalui dialog dan kerjasama, ASEAN berusaha menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan, termasuk Laut Natuna Utara, yang menjadi bagian dari wilayah ekonomi Indonesia.

Peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik di Laut Natuna Utara sangat penting karena konflik ini tidak hanya melibatkan Indonesia tetapi juga negara-negara besar seperti China yang memiliki klaim sepihak atas sebagian besar Laut China Selatan, termasuk Natuna. Ketegangan yang muncul dapat mempengaruhi stabilitas kawasan dan hubungan antar negara. Oleh karena itu, ASEAN, sebagai organisasi regional yang mengutamakan kerjasama, berperan dalam mengurangi ketegangan dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Lebih dari itu, ASEAN juga memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dan kebebasan navigasi di perairan yang sangat strategis ini, yang merupakan jalur pelayaran internasional penting yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Penyelesaian yang baik atas sengketa ini juga penting untuk menjaga hubungan antar negara-negara anggota ASEAN, terutama dengan Indonesia yang memiliki peran kunci dalam diplomasi kawasan (Rahmaddi, Yanto, & Haryadi, 2024).

ASEAN berupaya untuk menyelesaikan konflik di Laut Natuna Utara melalui beberapa langkah strategis yang melibatkan pendekatan diplomatik dan multilateral. Pertama, ASEAN memanfaatkan prinsip "*ASEAN Way*," yang berfokus pada penyelesaian masalah secara damai melalui dialog dan kerjasama antar negara. Dalam hal ini, Indonesia, sebagai anggota ASEAN yang juga terlibat langsung dalam sengketa Laut Natuna, berperan aktif dalam menginisiasi pembicaraan dan forum-forum diplomatik untuk mendorong negara-negara terkait untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Salah satu langkah penting dalam diplomasi ini adalah negosiasi mengenai Kode Etik Laut China Selatan (*Code of Conduct - CoC*) antara ASEAN dan China, yang diharapkan dapat

memitigasi klaim sepihak dan menciptakan aturan yang jelas mengenai hak-hak maritim di kawasan ini.

Selain itu, ASEAN juga mendorong penggunaan hukum internasional, khususnya UNCLOS untuk menyelesaikan sengketa. UNCLOS memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur perbatasan maritim termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE), yang diakui oleh semua negara anggota ASEAN. Indonesia juga memperjuangkan implementasi UNCLOS dalam menangani sengketa ini, yang semakin diperkuat melalui forum-forum ASEAN yang melibatkan negara-negara besar seperti China, Vietnam, dan Malaysia. Dalam hal ini, Indonesia berperan sebagai mediator yang mengedepankan dialog, sembari menjaga kedaulatan wilayahnya di Laut Natuna. Melalui langkah-langkah ini, ASEAN tidak hanya berusaha mengurangi ketegangan di Laut Natuna Utara, tetapi juga memperkuat solidaritas dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan negara-negara anggotanya (Firdaus, Yanto, Hikmah, & Nugroho, 2023).

2.3 Dinamika Kebijakan Era Prabowo

Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2024, negara ini memasuki babak baru dalam pengelolaan kebijakan luar negeri dan keamanan, terutama terkait dengan isu-isu maritim. Selama masa kampanye, Prabowo telah menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan negara, mengembangkan potensi ekonomi, dan meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional. Dalam konteks ini, Laut Natuna Utara, yang menjadi fokus ketegangan maritim dengan negara-negara seperti China dan Vietnam, memerlukan

perhatian khusus dalam kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan yang akan diterapkan oleh pemerintahan baru.

Kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo akan sangat menentukan arah perkembangan kawasan ini, mengingat pentingnya Laut Natuna sebagai jalur pelayaran internasional dan sumber daya alam yang vital bagi Indonesia. Prabowo yang sebelumnya dikenal dengan pendekatan tegasnya terhadap isu-isu pertahanan dan keamanan, berpotensi membawa perubahan dalam cara Indonesia berinteraksi dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut Natuna, serta dalam peranannya di ASEAN dan forum internasional lainnya. Oleh karena itu, dalam subbab ini, akan dibahas bagaimana dinamika kebijakan luar negeri dan keamanan maritim Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

2.3.1. Visi Strategis Prabowo dalam Mengubah Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia

Visi strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola kebijakan keamanan maritim Indonesia, khususnya terkait Laut Natuna Utara, mencerminkan pendekatan yang lebih tegas dan proaktif. Sebagai bagian dari komitmennya untuk memperkuat kedaulatan Indonesia, Prabowo memandang Laut Natuna sebagai wilayah yang sangat penting baik dari segi ekonomi, politik, maupun pertahanan. Kebijakan maritim Indonesia di bawah kepemimpinannya diharapkan akan berfokus pada penguatan kemampuan pertahanan maritim serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas ilegal di perairan Indonesia, seperti perikanan ilegal dan penyusupan wilayah yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih.

Alasan utama mengapa kebijakan maritim Indonesia perlu diperkuat adalah untuk melindungi sumber daya alam yang sangat bernilai, seperti gas alam dan ikan, yang menjadi sumber perekonomian penting bagi Indonesia. Laut Natuna Utara, yang kaya akan potensi sumber daya alam, juga terletak di jalur pelayaran internasional yang strategis. Namun, ketegangan yang meningkat dengan negara-negara seperti China dan Vietnam, yang memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih, menuntut Indonesia untuk lebih aktif dalam menjaga kedaulatan maritimnya. Prabowo, yang dikenal dengan pendekatannya yang tegas terhadap masalah pertahanan, menyadari pentingnya penguatan kebijakan keamanan maritim untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara maritim yang kuat (Rahmaddi, Yanto, & Haryadi, 2024).

Dalam menerjemahkan visinya, Prabowo berencana untuk memperkuat kebijakan keamanan maritim melalui berbagai langkah strategis yang mencakup penguatan pasukan militer, diplomasi internasional, serta penegakan hukum yang lebih ketat. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah memperkuat kehadiran militer Indonesia di Laut Natuna Utara dengan penempatan kapal perang dan pesawat patroli. Penggunaan teknologi canggih, seperti satelit dan UAV (*Unmanned Aerial Vehicles*), juga dioptimalkan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan maritim di wilayah ini. Selain itu, Indonesia berencana untuk melibatkan lebih banyak negara mitra strategis, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, dalam kerjasama keamanan maritim yang lebih intensif, untuk memperkuat patroli di perairan Laut Natuna Utara (Pramono, 2024).

Kebijakan maritim Indonesia juga mencakup diplomasi yang lebih aktif melalui forum-forum internasional, khususnya ASEAN, guna mengurangi ketegangan dengan negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih. Prabowo memandang bahwa penyelesaian sengketa maritim melalui dialog multilateral dan penguatan hukum internasional, seperti UNCLOS adalah langkah penting untuk mencegah konflik yang lebih besar. Dalam hal ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo berkomitmen untuk mengedepankan penyelesaian damai melalui jalur diplomatik sambil tetap memperkuat kemampuan pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayahnya di Laut Natuna (Yilmaz et al., 2024).